BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di Kelurahan Selat Utara masih terjadi sampai sekarang. Praktik tersebut dilakukan oleh tokoh agama yang tidak memiliki legitimasi formal dari negara untuk melakukan pencatatan pernikahan. Meskipun demikian, tokoh ini dianggap memiliki otoritas moral dan keagamaan oleh masyarakat, sehingga tetap dipercaya untuk menikahkan pasangan, khususnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk menikah secara resmi.

Adapun tata cara pelaksanaan pernikahan siri oleh penghulu ilegal tetap mengikuti rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yakni adanya wali nasab dari pihak perempuan, adanya mahar, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta dilaksanakannya ijab dan qabul. Namun, proses pengajuan pernikahan siri ini termasuk yang sistematis, ada beberapa aturan yang harus di taati sebelum menikah dengan warga kelurahan Selat Utara, yaitu dengan melampirkan berkas-berkas pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, serta KTP dan diserahkan kepada Ketua RT setempat.

Adapun factor-factor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan siri ini adalah

1. Faktor Ekonomi: Banyak masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk mengurus pernikahan secara resmi di KUA atau

mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini menjadi alasan utama mereka memilih pernikahan siri sebagai alternatif.

2. Faktor Usia: Sebagian besar pasangan yang menikah secara siri belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Karena itu, mereka tidak dapat menikah secara resmi tanpa dispensasi.
3. Aksesibilitas Lokasi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari KUA yaitu 8-10 KM menjadi alasan masyarakat menggunakan pernikahan siri sebagai alternative yang lebih cepat dan dianggap praktis.
4. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum: Tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah menyebabkan mereka tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.
5. Sosial: Kehamilan di luar nikah, dorongan orang tua, atau perjodohan. Kurangnya pemahaman hukum: Banyak warga belum mengetahui risiko hukum nikah siri.
6. Respon Lingkungan Praktik ini ditoleransi masyarakat, dianggap sebagai solusi instan dan sah secara agama. Serta Ketua RT mengetahui praktik ini, tetapi tidak memiliki kuasa mencegah karena dianggap urusan pribadi atau agama.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Mengutamakan pernikahan yang sah secara hukum negara demi menjamin hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

2. Bagi Pemerintah dan Pihak Berwenang

Memperluas akses terhadap layanan pernikahan resmi di wilayah yang sulit dijangkau dengan memberikan fasilitas seperti program nikah gratis atau pelayanan pencatatan pernikahan keliling. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal serta menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Penghulu dan Tokoh Agama

Para tokoh agama diharapkan dapat memberikan edukasi keagamaan yang mendorong masyarakat untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Penghulu sebaiknya turut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi praktik pernikahan siri dengan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pernikahan siri. Selain itu, dapat dikaji lebih dalam mengenai efektivitas program pemerintah dalam mengatasi pernikahan siri di masyarakat pedesaan.